



“

PERSIAPAN EVALUASI

RB, SAKIP, DAN
ZONA INTEGRITAS
Rabu, 25 Agustus 2021

”

Oleh
Inspektur Utama
Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA.

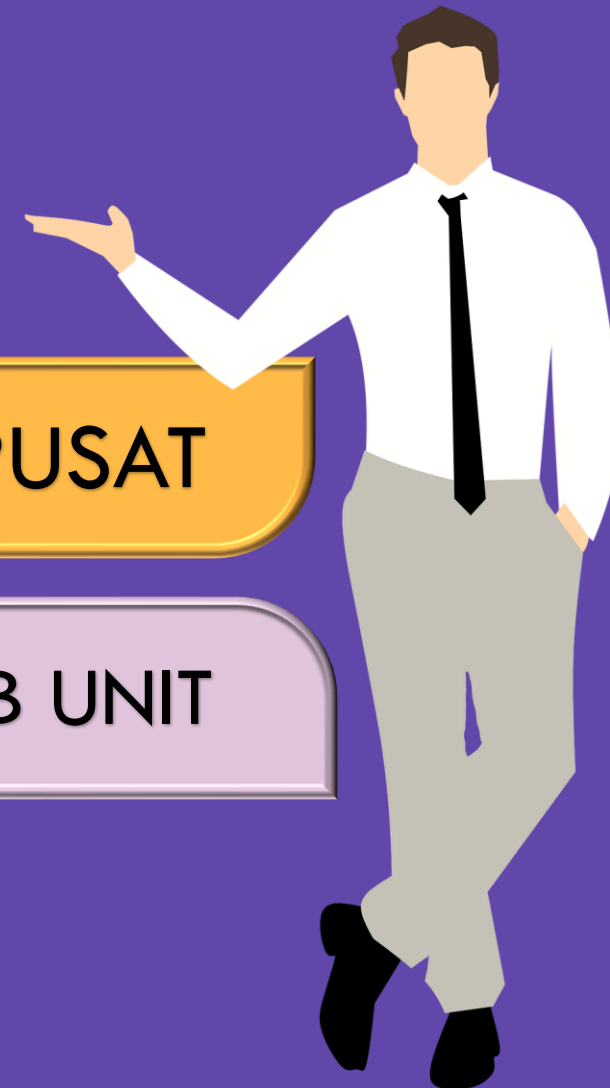


INFORMASI DAN KOMUNIKASI

31 Agustus 2021

EVALUASI RB PUSAT

EVALUASI RB UNIT



Timeline Evaluasi SAKIP dan RB





INSPEKTORAT UTAMA

Apa yang perlu dipersiapkan?



1

Memastikan kesiapan Tim Pelaksana RB Pusat dan/atau RB Unit Eselon I untuk dievaluasi.

2

Menyiapkan bukti dukung pernyataan LKE RB.

3

Menyiapkan paparan RB di Level Pusat dan/atau Unit Eselon I.

4

Menginformasikan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

5

Menginformasikan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kepada seluruh pegawai di lingkungannya.



Memastikan Terpenuhinya Nilai Komponen Hasil dan Sub Komponen Hasil Antara RB

Survei Penilaian Integritas (KPK)	Predikat SAKIP (KemenPANRB)	Indeks Pelayanan Publik (KemenPANRB)	Opini Laporan Keuangan (BPK)
Kapabilitas APIP (BPKP)	Maturitas SPIP (BPKP)	Indeks SPBE (KemenPANRB)	Indeks Pengawasan Kearsipan (ANRI)
	Kepatuhan Pelayanan Publik (ORI)	Indeks Pengelolaan Keuangan (Kemenkeu)	Indeks Kualitas PBJ (LKPP)
	Indeks Tata Kelola Manajemen SDM (BKN)	Indeks Profesionalitas ASN (BKN)	Indeks Sistem Merit (KASN)



Menginput Data Responden Untuk Pelaksanaan Survei Pengguna Layanan/Pemangku Kepentingan

SURVEI EKSTERNAL KEPADA PARA PENGGUNA LAYANAN

LOKUS SURVEI 2021

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

1. Lokus survei untuk Kementerian/Lembaga adalah unit kerja yang merupakan *core business* dari Instansi atau melakukan pelayanan langsung.
2. Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor: B/228/RB.04/2020 tanggal 1 September 2020, keempat unit terpilih adalah:
 - Biro Persidangan I;
 - Biro Pemberitaan Parlemen;
 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
 - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
3. Masing-masing unit kerja terpilih menyusun *customer list* dengan minimal jumlah 25 responden/pengguna layanan.
4. Masing-masing unit kerja yang disurvei baik untuk keperluan RB akan diberikan akun untuk mengakses aplikasi SHPRBZI (Aplikasi Survei Hasil Penilaian RB dan ZI Kementerian PAN dan RB).
5. Unit Kerja yang telah mendapatkan akun aplikasi SHPRBZI dapat mengakses aplikasi melalui laman website <https://shprbzi.menpan.go.id>.



**Pelaksanaan
Survei tanggal
1 s.d. 12
September 2021**

Survei Kepada Para Pengguna Layanan/ Pemangku Kepentingan

Daftar *customer list* (pengguna layanan) yang perlu disusun unit kerja terpilih, dengan format sebagai berikut :



No.	Produk Layanan (Produk/Jasa)	Nama Lengkap	Nomor Handphone	Nomor WhatsApp	Email
1.	wajib diisi	wajib diisi	wajib diisi	wajib diisi	tidak wajib diisi
2.					
3.					



Persiapan Evaluasi

Login

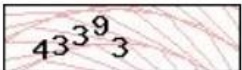
USERNAME

setjen.dpr

PASSWORD

.....

Kode Captcha



Kode Captcha

Jika kode Captcha terlihat tidak jelas, klik
REFRESH

Bantuan

Login

Copyright 2017 Kementerian PANRB

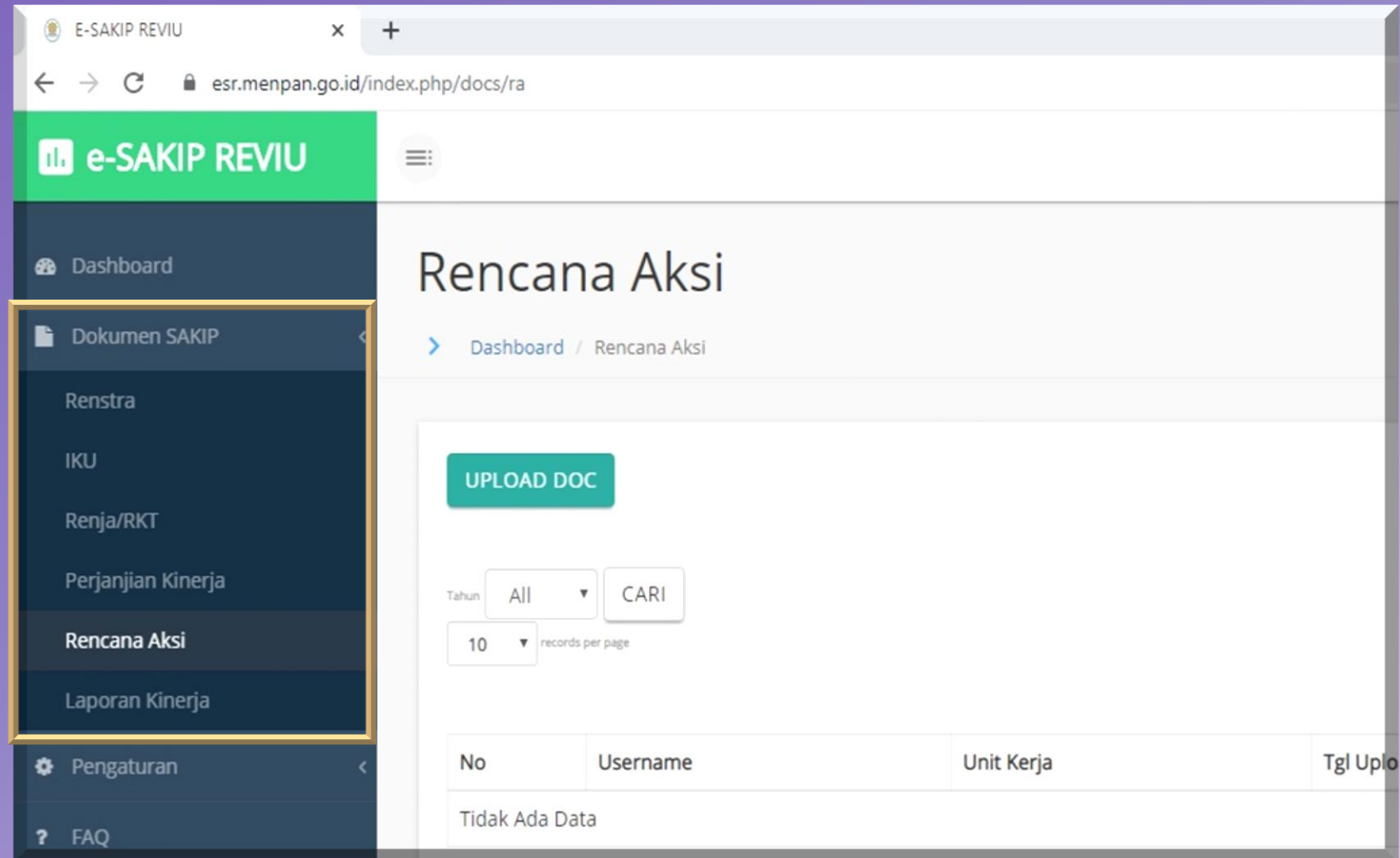
e-SAKIP REVIU

e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



Memastikan Dokumen SAKIP Telah Diunggah pada Aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id)



Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 untuk Perbaikan SAKIP Tahun 2021

1

Menetapkan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya dengan memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

2

Menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id.

3

Mempublikasikan Laporan Kinerja Deputy Bid. Persidangan, Deputy Bid. Administrasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan ke website dpr.go.id.

4

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN dan aplikasi PPKP, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

5

Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada Rencana Aksi Kinerja, dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.

6

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang membidangi pengelolaan SAKIP, dari mulai perencanaan, pengukuran, sampai dengan pelaporan kinerja, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di Setjen DPR RI.





INSPEKTORAT UTAMA

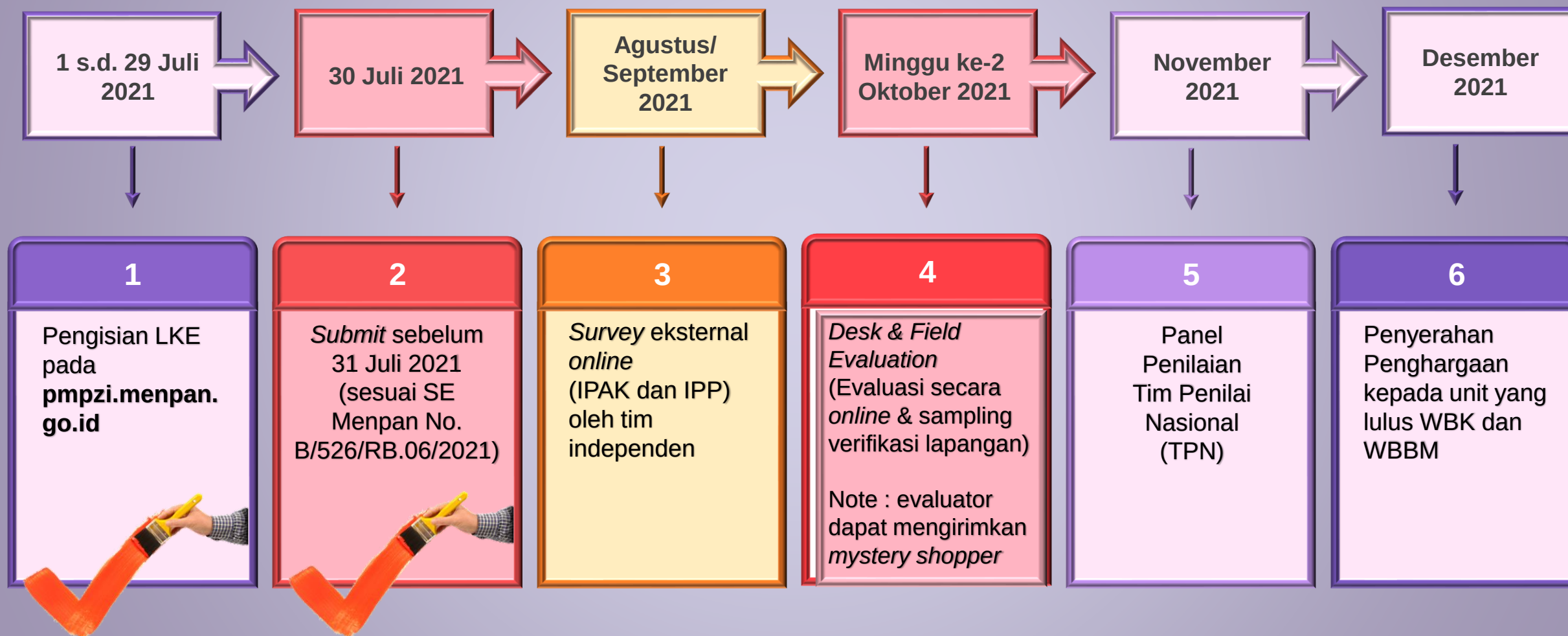
PERSIAPAN

Evaluasi ZI

Menuju Predikat WBK/WBBM



Timeline Evaluasi ZI



MEMAHAMI ZI

ZONA INTEGRITAS

1. BKSAP - WBK
2. PUSDIKLAT-WBK
3. ROSIDA-PARTISIPAN
4. PUSKA-PARTISIPAN
5. PUSPUU-BELOM
6. ROHUK & DUMAS-BELOM
7. ROPIM-BARU

ittama.dpr.go.id

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan VBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan

VBBM adalah Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik





Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 Area Perubahan

Belum terjadi perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, hanya mengejar nilai dan penghargaan (*procedural*, formalistik dan dokumentatif)

Keterlibatan Pimpinan secara aktif dan massif dalam Monev pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah

Pemahaman keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah

Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* eksternal belum dilakukan secara massif dan efektif.

Inovasi program dan kegiatan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan *stakeholder*

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan *stakeholder*



Komitmen Pimpinan Unit ZI

Pemimpin sebagai lokomotif perubahan

harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong pembangunan Zona Integritas.

Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara "*Ing Madyo Mangun Karso*".

Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui zona integritas akan menjadi sebuah keniscayaan.



Kepala Biro Kerjasama
Antar Parlemen dan Organisasi
Internasional



Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan



Plt. Kepala Biro Persidangan II



Kepala Pusat Kajian Anggaran



Plt. Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang



Plt. Kepala Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat



Plt. Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan



Apa Yang Perlu dipersiapkan?



1. Kesiapan Jawaban yang elaboratif
2. Kesiapan Data Dukung (digital, *soft copy*)
3. Inovasi
4. Progres Reform (kondisi *before-after*)



Menyusun Data Responden Pengguna Layanan, Membuat Video dan Paparan Proses Pembangunan ZI

1. Menyusun responden list pengguna layanan dengan ketentuan:
 - a. Responden adalah pengguna layanan yang telah purna mendapatkan seluruh tahapan/proses pelayanan
 - b. Minimal 100 responden
 - c. Maksimal yang telah menerima layanan dari unit kerja 2 bulan terakhir
2. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada unit kerja yang diusulkan di upload pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja durasi maksimal 5 menit



Video sudah diupload paling lambat minggu ke-1 Bulan Oktober

3. Mempersiapkan paparan untuk keperluan evaluasi secara virtual. Minimal informasi yang harus disampaikan sebagai berikut:
 - a. Progres reform (kondisi *before-after*)
 - b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja
 - c. Inovasi pada sektor pelayanan dan penguatan integritas untuk mencegah KKN
4. Menampilkan video publikasi dan banner yang menampilkan informasi tentang survey dan pengaduan ZI di tiap unit kerja yang sedang dalam pengusulan.





Survei Kepuasan Pengguna Layanan

I. KUALITAS PELAYANAN

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini;
3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
5. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan *online* yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan *online* pada unit layanan ini merespons keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.

II. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini;
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini;
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini;
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini;
5. Tidak ada pencaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus/baik saja ?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini ?



PERBAIKAN LAYANAN (Jawaban Terbuka)

Daftar pertanyaan diatas merupakan pertanyaan *Survey* pada Tahun 2020

E-Learning Bimtek Pengendalian Gratifikasi KPK

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.



<https://elearning.kpk.go.id/>



INSPEKTORAT UTAMA

Stay Safe

COVID-19
PANDEMIC

